

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu agenda penting yang selalu dibahas baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, hal ini dikarenakan pentingnya pembangunan ekonomi akan memberikan dampak yang sangat besar khususnya peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut Meier dalam Mugihardjo (2007), pembangunan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan pendapatan nasional riil perkapita meningkat dalam waktu lama. Maka dari itu terciptanya pembangunan ekonomi harus terlaksana baik itu di tingkat daerah maupun nasional.

Menurut Noegroho (2007) kebijaksanaan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Namun hasil pembangunan kadang belum dirasakan merata dan masih terdapat kesenjangan antar daerah. Kesenjangan antar daerah dapat dilihat melalui tingkat PDRB Perkapita yang dirasakan cukup bervariasi.

Dalam proses pembangunan ekonomi disuatu daerah tidak hanya terpusat pada pertumbuhan ekonomi semata melainkan ada beberapa tujuan yang diharapkan dapat terwujud, adapun tujuan-tujuan tersebut adalah dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur dan berkeadilan. Menurut Todaro (2006) proses pembangunan paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu :

1. peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok
2. peningkatan standar hidup
3. perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Sedangkan menurut Todaro (2006) dalam proses pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan adalah menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan (disparitas pendapatan), dan tingkat pengangguran.

Menurut Arsyad (2004) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, masih banyak penduduk yang memiliki pendapatan dibawah standar kebutuhan hidupnya. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya menjamin akan berkurangnya tingkat kemiskinan, target utama dalam pembangunan ekonomi adalah bagaimana supaya distribusi pendapatan dapat merata.

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota**  
**Kalimantan Barat tahun 2010 – 2013**  
**(Dalam Persen)**

KABUPATEN / KOTA	2010	2011	2012	2013
Kabupaten Sambas	5,79	5,8	5,88	5,99
Kabupaten Bengkayang	4,63	5,65	5,74	6,04
Kabupaten Landak	5,13	6,9	6,03	6,21
Kabupaten Pontianak	2,13	4,86	3,54	5,08
Kabupaten Sanggau	4,15	4,61	5,92	6,04
Kabupaten Ketapang	7,51	7,98	5,01	6,97
Kabupaten Sintang	5,19	5,45	5,82	6,34
Kabupaten Kapuas Hulu	4,44	4,56	5,61	6,01
Kabupaten Sekadau	5,85	5,73	5,95	6,71
Kabupaten Melawi	5,75	6,54	6,58	6,73
Kabupaten Kayong Utara	5,92	5,93	6,01	6,00
Kabupaten Kubu Raya	6,23	6,51	6,69	6,79
Kota Pontianak	5,39	5,88	6,07	6,91
Kota Singkawang	5,54	6,46	6,18	6,36
KALIMANTAN BARAT	5,35	5,98	5,81	6,08

*Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Barat*

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat selama masa penelitian mengalami peningkatan, dimana angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat berkisar diatas 5 %. Kabupaten ketapang adalah Kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi dimana pertumbuhan sebesar 6,97 % hal ini dipengaruhi oleh hasil sektor pertanian yang terus meningkat. Kota Pontianak memiliki pertumbuhan ekonomi ke 2 tertinggi dengan jumlah 6,91 % pada tahun 2013, hal ini dikarenakan Kota Pontianak adalah pusat perdagangan dan jasa di Kalimantan Barat serta sebagai Ibu Kota Propinsi Kalimantan Barat. Pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Pontianak hanya sebesar 2,13 % pada tahun 2010.

Menurut Nurhuda (2012) salah satu alat pengukur tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu daerah adalah tingkat pendapatan masyarakat yang dilihat melalui PDRB Perkapita, dimana semakin besar PDRB Perkapita maka bisa diartikan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya, begitu juga sebaliknya apabila PDRB Perkapita rendah maka tingkat kesjahteraan masyarakatnya juga ikut rendah.

Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan dengan kenaikan dari PDRB per kapita tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertambahan penduduk (Arsyad,1997). Menurut Todaro (2004), laju pertumbuhan yang tinggi tidak selalu memperburuk distribusi pendapatan. Di dalam bukunya Todaro mengemukakan karakter pertumbuhan ekonomi (*character of economic growth*) yaitu bagaimana cara mencapainya, siapa yang berperan serta, sektor-sektor mana saja yang mendapat prioritas, lembaga-lembaga apa yang menyusun dan yang mengatur, dan sebagainya. Karakter pertumbuhan ekonomi ini yang menentukan apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin atau tidak.

**Tabel 1.2**  
**PDRB Perkapita Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat**  
**Tahun 2010-2013**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Kabupaten Sambas	5.892.118,18	6.173.098,65	6.451.501,11	6.752.162,02
Kabupaten Bengkayang	5.396.117,47	5.584.820,67	5.794.711,61	6.038.247,22
Kabupaten Landak	4.850.380,58	5.099.144,67	5.318.352,26	5.557.006,42
Kabupaten Pontianak	5.199.097,14	5.369.793,43	5.474.948,94	5.663.303,75
Kabupaten Sanggau	6.503.759,30	6.687.275,96	6.965.219,17	7.264.296,23
Kabupaten Ketapang	6.508.469,51	6.873.513,37	7.080.491,43	7.432.393,18
Kabupaten Sintang	5.700.046,25	5.907.867,21	6.148.892,60	6.434.339,48
Kabupaten Kapuas Hulu	5.300.731,35	5.428.469,41	5.628.014,57	5.860.093,95
Kabupaten Sekadau	3.677.942,72	3.837.566,20	4.007.722,84	4.215.047,87
Kabupaten Melawi	2.991.601,84	3.128.223,57	3.276.676,16	3.438.550,51
Kabupaten Kayong Utara	4.536.245,78	4.713.424,67	4.904.559,21	5.105.458,90
Kabupaten Kubu Raya	9.820.042,07	10.275.729,45	10.777.241,42	11.317.951,42
Kota Pontianak	11.892.237,92	12.359.716,27	12.874.979,05	13.539.985,32
Kota Singkawang	6.571.415,85	6.846.839,43	7.134.009,58	7.442.030,24
<b>KALIMANTAN BARAT</b>	<b>6.060.014,71</b>	<b>6.306.105,93</b>	<b>6.559.808,57</b>	<b>6.861.490,47</b>

*Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Barat*

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat pada dasarnya memiliki tingkat PDRB Perkapita yang sebagian besar masih dibawah PDRB Perkapita Kalimantan Barat tetapi pada masa penelitian PDRB Perkapita Kalimantan Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan PDRB Perkapita tertinggi pada Kota Pontianak sebesar Rp. 13.539.985,32,- diikuti oleh Kabupaten Kuburaya sebesar Rp. 11.317.951,42,- hal ini dikarenakan Kota Pontianak adalah Ibu Kota Propinsi Kalimantan Barat sebagai sentral perdagangan dan jasa serta pusat pemerintahan dan diikuti oleh Kabupaten Kubu Raya sebagai daerah pendamping Kota Pontianak hal ini dikarenakan faktor geografis daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya tidak hanya terfokus pada perdagangan dan jasa

tetapi tingkat pertanian dan industri juga ikut mempengaruhi tingkat PDRB Perkapitanya. Sedangkan Kabupaten / Kota dengan tingkat PDRB Perkapita terendah adalah Kabupaten Melawi dimana PDRB Perkapita Kabupaten Melawi sebesar Rp. 3.458.550,51,- dan diikuti oleh Kabupaten Sekadau dengan tingkat PDRB Perkapita sebesar Rp. 4.215.047,87,- dan sisa 10 Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat tingkat PDRB Perkapita berkisar Rp 5.105.458,90 - Rp. 7.442.030,20,- . Hal ini menunjukkan bahwa adanya indikator ketidakmerataan pendapatan yang memicu terjadinya ketimpangan atau disparitas antar Kabupaten / Kota di Propinsi Kalimantan Barat.

Di Negara-negara berkembang khususnya Indonesia selama proses pembangunan ekonomi terjadi dilema antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang tidak merata dimana jika terjadi pertumbuhan ekonomi maka akan terjadi ketimpangan pendapatan, tingkat pertumbuhan ekonomi relatif tinggi tetapi tidak diikuti pemerataan distribusi pendapatan yang mana masih banyak pendapatan masyarakat dibawah rata-rata. Simon Kuznets dalam Kuncoro (2006) telah mengemukakan bahwa pada tahap-tahap awal pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Hipotesis ini dikenal sebagai hipotesis "U-terbalik" Kuznets.

Kesenjangan distribusi pendapatan yang tidak merata erat kaitanya dengan pendapatan perkapita dimana angka rata-rata yang tidak mencerminkan pendapatan yang diterima oleh tiap-tiap penduduk. Besarnya pendapatan yang diterima oleh tiap penduduk sebenarnya sangat berkaitan dengan masalah merata atau tidak meratanya distribusi pendapatan tersebut. Oleh karena itu pemerataan pendapatan adalah masalah yang penting dalam pembangunan. Tambunan (2001) menyatakan bahwa pada dekade 1980an

sampai pertengahan dekade 1990an Indonesia menikmati laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi dengan tingkat kesenjangan yang semakin besar.

Menurut Rachmaningsih (2010) distribusi pendapatan yang tidak merata hanya akan membuat ketimpangan pembangunan dan tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Sistem distribusi yang tidak merata hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja.

Menurut Sjafrizal (2001), ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah, ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Adanya ketimpangan antar wilayah mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang berimbas pada adanya wilayah maju dan wilayah terbelakang.

Kalimantan Barat yang memiliki 14 Kabupaten / Kota ini memiliki persoalan yang harus diselesaikan salah satunya masalah ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, hal ini dikarenakan pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional di Indonesia.

Ketimpangan Wilayah merupakan masalah krusial pada suatu wilayah dan besaran ketimpangan wilayah ini sangat dibutuhkan oleh para analis terutama pemerintah guna pembangunan daerah yang lebih merata. Adapun metodologi yang biasa digunakan dalam penghitungan ketimpangan wilayah adalah Indeks Theil, Indeks Williamson, Indeks Gini.

Untuk mengukur ketimpangan yang berlaku di Kalimantan Barat digunakan ukuran ketimpangan Indeks Theil. Menurut studi Akita dan Alisyahbana dalam Sjafrizal (2001) dengan menggunakan Indeks Theil sebagai alat ukur ketimpangan pembangunan

antar wilayah dengan mengingat ketimpangan Propinsi berkaitan langsung dengan ketimpangan pada tingkat kabupaten dan kota.

**Tabel 1.3**  
**Indeks Theil Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat**  
**Tahun 2010 – 2013**  
**(Dalam Angka)**

<b>Kabupaten / Kota</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Kabupaten Sambas	0,750	0,760	0,770	0,780
Kabupaten Bengkayang	0,950	0,940	0,930	0,930
Kabupaten Landak	0,690	0,700	0,700	0,700
Kabupaten Pontianak	0,870	0,860	0,840	0,830
Kabupaten Sanggau	0,950	0,940	0,940	0,940
Kabupaten Ketapang	0,940	0,950	0,940	0,950
Kabupaten Sintang	0,829	0,823	0,824	0,827
Kabupaten Kapuas Hulu	0,910	0,890	0,890	0,880
Kabupaten Sekadau	0,590	0,600	0,600	0,610
Kabupaten Melawi	0,450	0,450	0,450	0,460
Kabupaten Kayong Utara	0,980	0,970	0,970	0,970
Kabupaten Kubu Raya	1,570	1,580	1,600	1,610
Kota Pontianak	1,970	1,960	1,960	1,980
Kota Singkawang	1,290	1,290	1,290	1,290

*Sumber : Data diolah*

Berdasarkan tabel 1.3 yang menyajikan data ketimpangan pembangunan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa ketimpangan di Kalimantan Barat yang diukur lewat indeks theil relatif timpang dimana ukuran ketimpangan indeks mendekati 1 artinya sangat timpang dan sebaliknya bila indeks mendekati 0 berarti sangat merata. Di ketahui pada masa penelitian tahun 2010-2013 tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat yang diukur dari PDRB cukup tinggi, hal ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat tidak menjamin meratanya distribusi pendapatan malahan pertumbuhan yang terjadi memicu tingginya tingkat ketimpangan.

Kesenjangan pendapatan antar Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat bukanlah masalah kecil yang akan hilang dengan sendirinya akan tetapi harus ada penanganan serius dan harus menjadi satu pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.

Isu kesenjangan ekonomi dan distribusi pendapatan antar daerah berkaitan dengan proses pembangunan ekonomi, peningkatan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Semakin tingginya kesenjangan pendapatan akan berimplikasi pada kenaikan kemiskinan dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah. Dengan demikian perlu adanya analisis mengenai hal tersebut, skripsi ini mengambil judul "ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010 - 2013".

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Hipotesis Kuznet berlaku di Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat.
2. Bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita terhadap tingkat ketimpangan di Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis apakah Hipotesis Kuznet berlaku di Kalimantan Barat.
2. Mengetahui dan menganalisis hubungan pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita terhadap tingkat ketimpangan pembangunan Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut dalam aspek yang sama maupun aspek yang berhubungan.



2. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pembangunan daerah untuk menyusun rencana pembangunan dimasa yang akan datang dalam rangka mengatasi Ketimpangan yang terjadi pada tiap daerah di Propinsi Kalimantan Barat.

Universitas Tanjungpura